

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi internasional merupakan faktor umum yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai hasil dari adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan di berbagai negara, fenomena ini masih terus berkembang (Noveria, 2017). Menurut pemahaman umum, terdapat dua jenis utama migrasi: migrasi lintas batas internasional dan migrasi di dalam suatu negara. Istilah “migrasi internal” mengacu pada pergerakan penduduk di dalam satu negara, yang paling sering terjadi antar provinsi, sedangkan “migrasi internasional” menggambarkan pergerakan penduduk antar negara (Leni et al., 2016).

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, migrasi telah menjadi salah satu karakteristik penting dalam dinamika ketenagakerjaan. Di provinsi Sumatera Barat, fenomena ini tercermin dari perpindahan tenaga kerja dari kawasan pedesaan maupun perkotaan menuju negara-negara lain (Qomariya et al., 2021). Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya arus migrasi tersebut. Para pekerja migran dari Indonesia tertarik untuk pergi ke negara tujuan karena berbagai alasan, antara lain pasar kerja yang lebih luas, upah yang lebih tinggi, dan stabilitas ekonomi (Nufus & Akmaluddin, 2025).

Kecenderungan migrasi internasional di Sumatera Barat tidak hanya dapat diamati secara kualitatif, tetapi juga tercermin dalam data kuantitatif jumlah migran internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk Sumatera Barat yang melakukan migrasi ke luar negeri menunjukkan pola yang relatif konsisten,

dengan kecenderungan memilih negara tujuan tertentu. Pola ini mengindikasikan bahwa migrasi internasional tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan rasional, khususnya yang berkaitan dengan peluang kerja dan kondisi ekonomi di negara tujuan.

Tabel 1.1 Jumlah Migrasi Internasional di Provinsi Indonesia Tahun 2020-2024

ASAL PROVINSI PMI	JUMLAH	ASAL PROVINSI PMI	JUMLAH
JAWA TIMUR	275807	RIAU	1472
JAWA TENGAH	222354	SULAWESI TENGAH	1103
JAWA BARAT	186706	KALIMANTAN UTARA	981
NUSA TENGGARA BARAT	98803	J A M B I	892
LAMPUNG	75371	SULAWESI TENGGARA	807
SUMATERA UTARA	33175	KALIMANTAN SELATAN	604
BALI	32923	SULAWESI BARAT	534
BANTEN	9818	KALIMANTAN TIMUR	486
SUMATERA SELATAN	5770	KALIMANTAN TENGAH	202
NUSA TENGGARA TIMUR	5246	MALUKU	152
DKI JAKARTA	4680	BANGKA BELITUNG	123
SULAWESI SELATAN	4585	PAPUA	114
DI YOGYAKARTA	4307	GORONTALO	74
KALIMANTAN BARAT	2782	MALUKU UTARA	36
SUMATERA BARAT	2612	PAPUA BARAT	32
SULAWESI UTARA	2441	R I A U	6
ACEH	1946	PAPUA TENGAH	1
KEPULAUAN RIAU	1902	PAPUA SELATAN	1
BENGKULU	1733	PAPUA BARAT DAYA	1

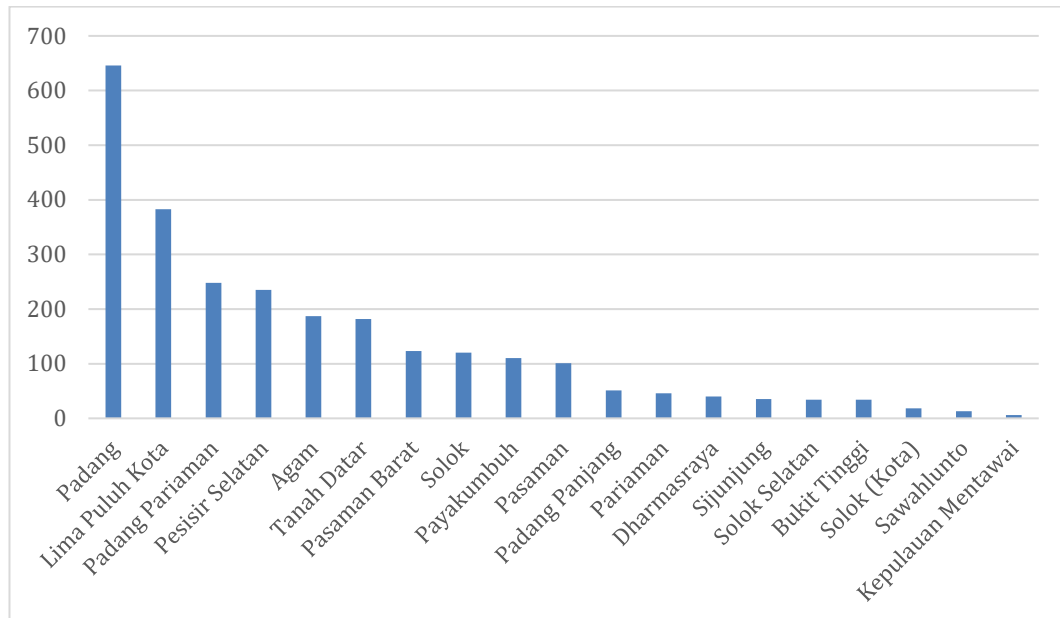
Sumber: BP2MI (diolah, 2026)

Berdasarkan data migrasi internasional tahun 2020–2024, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah asal migran internasional tertinggi, diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sementara itu, Sumatera Barat mencatat 2.612 migran internasional dan termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat migrasi menengah. Meskipun jumlahnya relatif lebih rendah, migrasi internasional di Sumatera Barat

memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh budaya merantau masyarakat Minangkabau. Para migran berusaha meningkatkan taraf hidup mereka melalui migrasi, yang didorong oleh pengaruh budaya serta ketimpangan kondisi ekonomi antardaerah. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup hal-hal seperti pendapatan, prospek kerja, dan kesejahteraan.

Karena fenomena migrasi internasional di Sumatera Barat berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, hal ini menjadikannya topik penelitian yang menarik. Di provinsi-provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, kabupaten sering kali menjadi sumber mayoritas migran luar daerah. Menurut Todaro dan Smith (2015), perbedaan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan antarwilayah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya migrasi, di mana daerah dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah cenderung memiliki dorongan migrasi yang lebih tinggi. Pola tersebut umumnya banyak ditemukan pada wilayah kabupaten atau perdesaan. Namun, kondisi yang berbeda ditemukan di Sumatera Barat, di mana migrasi internasional justru didominasi oleh Kota Padang sebagai ibu kota provinsi. Kondisi ini menunjukkan adanya pola yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kecenderungan teoritis,

sehingga menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi migrasi internasional di Sumatera Barat.



Sumber: BP2MI (diolah, 2025)

Gambar 1.1 Jumlah Migrasi Internasional Tahun 2020 – 2024 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat

Merujuk pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwasanya migrasi terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan daerah dengan akses serta aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, terutama Kota Padang yang mencatat jumlah tertinggi (646 orang) sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Kabupaten Lima Puluh Kota dan Padang Pariaman berada pada urutan berikutnya, yang mengindikasikan pengaruh kedekatan geografis dan konektivitas dengan ibu kota provinsi. Sebaliknya, kabupaten/kota seperti Solok (Kota), Sawahlunto, dan Kepulauan Mentawai memiliki jumlah migrasi internasional yang sangat rendah, yang mencerminkan keterbatasan akses, peluang ekonomi, dan daya tarik wilayah. Secara umum, pola ini menegaskan bahwa faktor urbanisasi, aksesibilitas, dan jaringan sosial-ekonomi

menjadi penentu utama tingkat migrasi internasional antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Fenomena migrasi internasional pada umumnya lebih banyak terjadi di wilayah yang bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi atau ibu kota daerah. Para migran cenderung mencari peluang kerja yang lebih baik di negara lain jika mereka tinggal di daerah dengan pendapatan rendah, sedikit peluang kerja, dan akses ekonomi yang terbatas. Kondisi tersebut lazim ditemukan pada wilayah perdesaan atau daerah dengan aktivitas ekonomi yang belum berkembang secara optimal.

Pola yang berbeda terlihat di Provinsi Sumatera Barat. Menurut data migrasi internasional, arus migrasi terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi rendah dan cukup tinggi di pusat-pusat perkotaan, terutama di Padang. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan sekaligus ibu kota provinsi, Kota Padang memiliki tingkat aktivitas ekonomi, infrastruktur, serta peluang kerja yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lain. Meskipun demikian, kota Padang justru mencatat jumlah migrasi internasional tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena yang menarik, yaitu tingginya migrasi internasional dari wilayah yang secara ekonomi lebih maju. Situasi tersebut mengisyaratkan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan belum sepenuhnya mampu menahan arus migrasi keluar. Persaingan kerja yang lebih ketat, keterbatasan lapangan kerja formal, serta perbedaan tingkat pendapatan dengan negara tujuan diduga menjadi faktor yang mendorong sebagian

masyarakat perkotaan tetap memilih migrasi internasional sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Tabel 1.2 Data Migrasi Provinsi Sumatera Barat ke Negara Tujuan dari Tahun 2020 – 2024

No	Negara	Jumlah
1	Malaysia	1320
2	Jepang	1010
3	Arab Saudi	88
4	Korea Selatan	40
5	Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara	32
6	Taiwan	29
7	Brunei Darussalam	21
8	Qatar	11
9	Lain - Lain	61

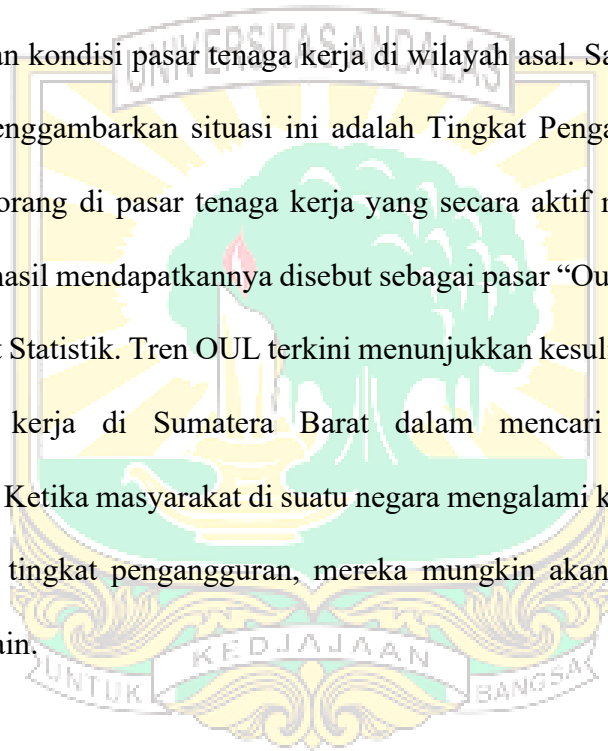
Sumber: BP2MI (diolah, 2025)

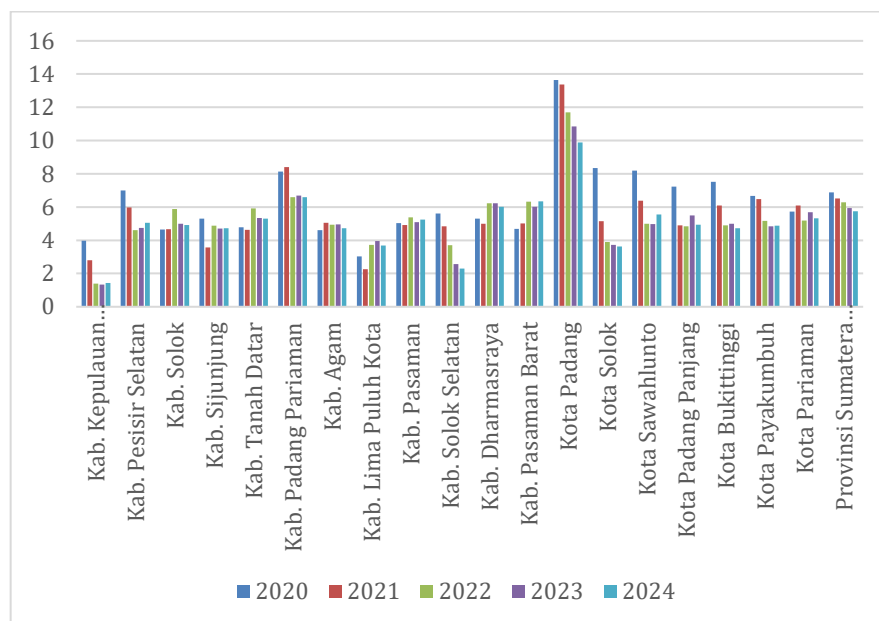
Negara tujuan utama migrasi internasional didominasi oleh beberapa negara tertentu, seperti Malaysia, Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, dan lain- lain, yang dikenal menawarkan peluang kerja lebih luas serta tingkat pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah asal. Konsentrasi tujuan migrasi pada negara-negara tersebut mencerminkan adanya daya tarik ekonomi yang kuat, sehingga migrasi internasional tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menjadi strategi rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini memperkuat pentingnya kajian mengenai faktor-faktor ekonomi di daerah asal yang mempengaruhi migrasi internasional, khususnya di Sumatera Barat.

Negara-negara tujuan migrasi penduduk Provinsi Sumatera Barat tersebut dipilih karena dipengaruhi oleh perbedaan tingkat upah, ketersediaan lapangan kerja, serta stabilitas ekonomi di negara tujuan. Malaysia dan Jepang menjadi tujuan utama karena kedekatan geografis, tingginya permintaan tenaga kerja, dan peluang

pendapatan yang lebih baik dibandingkan daerah asal. Negara-negara Timur Tengah, seperti Qatar serta Arab Saudi, menarik migran karena kebutuhan tenaga kerja yang besar dengan sistem kerja kontraktual. Pemilihan Korea Selatan, Taiwan, Brunei Darussalam, Inggris Raya dan Irlandia Utara, serta Korea Selatan didasarkan pada upah yang lebih tinggi, hak-hak tenaga kerja yang lebih kuat, dan adanya jaringan migran yang memudahkan perpindahan.

Sejumlah faktor memengaruhi migrasi internasional, termasuk pola migrasi, negara tujuan, dan kondisi pasar tenaga kerja di wilayah asal. Salah satu indikator penting yang menggambarkan situasi ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (OUR). Jumlah orang di pasar tenaga kerja yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya disebut sebagai pasar “Out of Work” (OUL) oleh Badan Pusat Statistik. Tren OUL terkini menunjukkan kesulitan yang dihadapi penduduk usia kerja di Sumatera Barat dalam mencari pekerjaan yang menguntungkan. Ketika masyarakat di suatu negara mengalami kesulitan keuangan akibat tingginya tingkat pengangguran, mereka mungkin akan mencari peluang kerja di tempat lain.





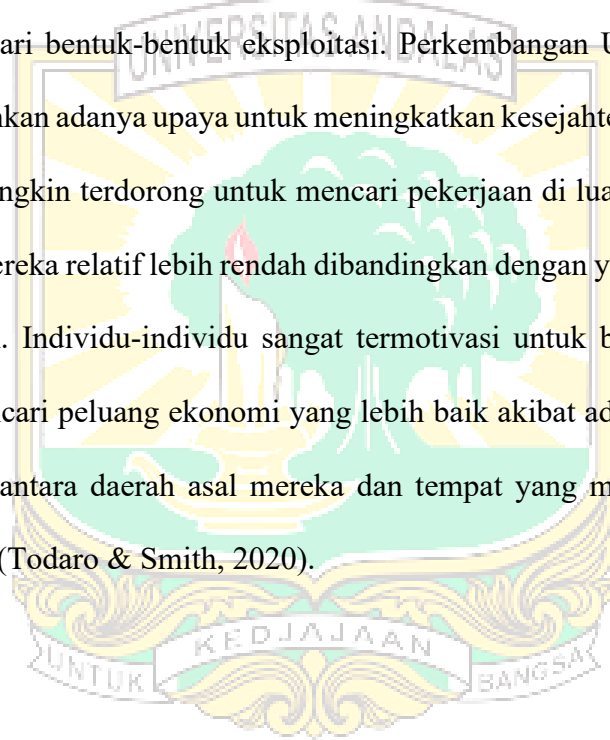
Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)

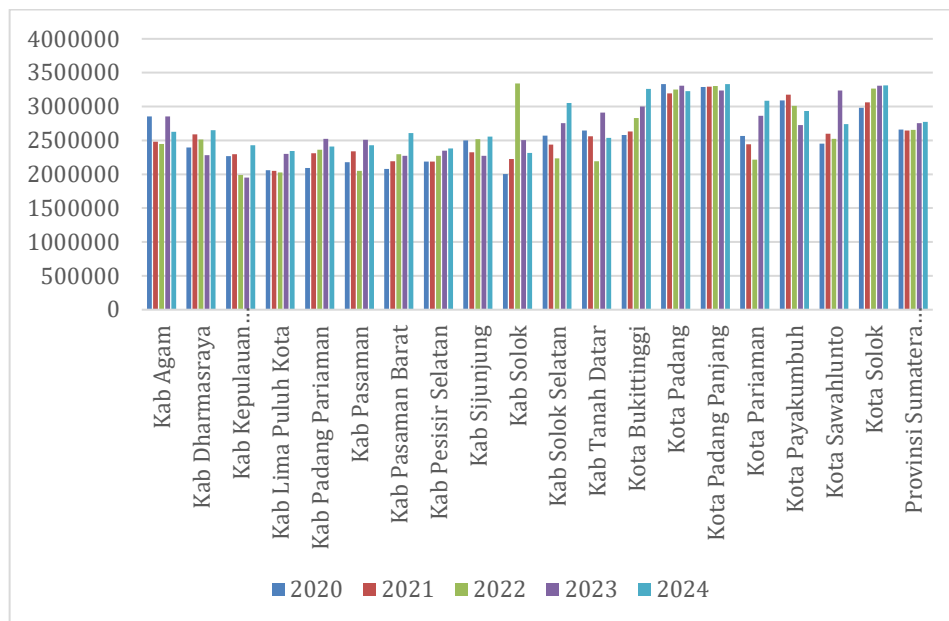
Sumber: BPS (diolah 2025)

Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatra Barat mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2, akibat membaiknya kondisi pasar tenaga kerja pasca-pandemi. Terjadi penurunan tingkat pengangguran provinsi dari 6,88% pada tahun 2020 menjadi 5,75% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tren menunjukkan penurunan menjelang akhir periode tersebut, namun terjadi perubahan di hampir setiap kabupaten dan kota. Kota Padang memiliki tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain, meskipun angka tersebut turun secara signifikan dari 13,64 persen pada tahun 2020 menjadi 9,88 persen pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2024, beberapa wilayah justru mencatat tingkat pengangguran yang sangat rendah. Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan. Secara umum, angka-angka ini menunjukkan bahwa perekonomian semakin

membaik dan semakin banyak orang yang mendapatkan pekerjaan, meskipun masih terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam tingkat pengangguran antara kabupaten-kabupaten dan kota metropolitan.

Selain kondisi pengangguran, tingkat upah di daerah asal juga merupakan faktor ekonomi yang berperan penting dalam migrasi internasional. Upah Minimum Regional (UMR) ialah standar pengupahan terendah yang pemerintah tetapkan sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja agar mendapat pendapatan yang layak serta terhindar dari bentuk-bentuk eksploitasi. Perkembangan UMR di Sumatera Barat mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Orang-orang mungkin terdorong untuk mencari pekerjaan di luar negeri jika upah di negara asal mereka relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang bisa diperoleh di negara tujuan. Individu-individu sangat termotivasi untuk bermigrasi ke luar negeri demi mencari peluang ekonomi yang lebih baik akibat adanya kesenjangan gaji yang besar antara daerah asal mereka dan tempat yang mereka rencanakan untuk ditinggali (Todaro & Smith, 2020).





Gambar 1.3 Rata - Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)

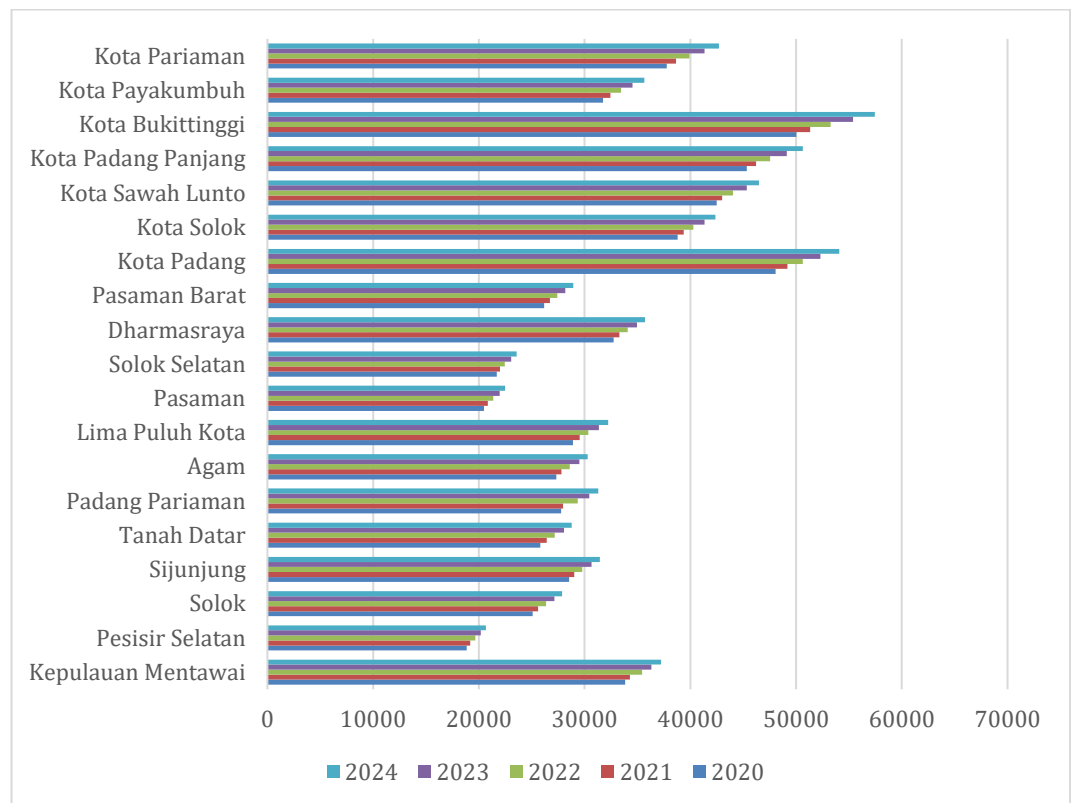
Sumber: BPS(diolah, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.3, Upah dan penghasilan pekerja serta karyawan di Provinsi Sumatera Barat secara umum mengalami kenaikan antara tahun 2020 dan 2024, dengan variasi regional yang signifikan. Upah rata-rata provinsi tetap stabil pada tahun 2020 dan 2022, dan mengalami kenaikan yang lebih substansial pada tahun 2023 dan 2024. Kota-kota seperti Padang, Sawahlunto, Payakumbuh, dan Padang Panjang secara rutin masuk dalam kategori upah tertinggi, sebagaimana umumnya terjadi pada kota-kota dibandingkan kabupaten. Kota Solok dan Kota Pariaman juga menunjukkan peningkatan signifikan hingga 2024. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, dan Solok Selatan cenderung memiliki upah lebih rendah dan mengalami penurunan pada periode tertentu sebelum kembali meningkat di 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan upah antar wilayah yang masih cukup nyata, dipengaruhi oleh

tingkat urbanisasi, struktur ekonomi, dan aktivitas industri di masing-masing kabupaten/kota.

Kondisi pasar tenaga kerja di daerah asal tidak hanya tercermin melalui tingkat pengangguran dan besaran upah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Menurut Todaro dan Smith (2015), kita perlu memperhatikan upah minimum regional dan tingkat pengangguran terbuka serta produk domestik regional bruto (PDRB) untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi migrasi internasional. Indikator-indikator ini merupakan hasil dari perkembangan ekonomi suatu wilayah.

Salah satu ukuran terpenting dari kesehatan ekonomi dan potensi pembangunan adalah produk domestik bruto regional (PDBR). Menurut Sukirno (2016), PDBR adalah jumlah dari seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi suatu provinsi atau wilayah. Secara teori, PDBR Regional yang lebih tinggi seharusnya menghasilkan lebih banyak lowongan pekerjaan dan pendapatan median yang lebih tinggi bagi seluruh warga. Di sisi lain, sebagaimana dapat dilihat dari contoh-contoh di dunia nyata, tidak ada jaminan bahwa distribusi manfaat ekonomi yang merata akan mengikuti laju pertumbuhan ekonomi regional tertentu (Kuncoro, 2010). Di Provinsi Sumatera Barat, perkembangan PDBR menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, tetapi ketimpangan kesempatan kerja dan keterbatasan sektor formal masih menjadi tantangan.



Sumber: BPS (diolah, 2025)

Gambar 1.4 PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan Kab/Kota Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024

Dari tahun 2020 hingga 2024, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan harga konstan untuk kabupaten dan kota di Sumatera Barat menunjukkan tren kenaikan secara keseluruhan, yang mengindikasikan bahwa perekonomian sedang pulih dan berkembang pasca pandemi. Padang Panjang, Bukittinggi, Padang, dan Sawahlunto memiliki PDRB regional per kapita tertinggi, yang mencerminkan struktur ekonomi yang lebih produktif dengan nilai tambah yang tinggi. Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan termasuk di antara daerah dengan PDB regional per kapita terendah, meskipun demikian mereka tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Dharmasraya dan Pasaman Barat

menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat. Berdasarkan data ini, wilayah perkotaan dan pusat ekonomi menunjukkan kinerja PDB per kapita yang lebih baik daripada wilayah pedesaan dan kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antardaerah masih berlanjut.

Atiyatna dkk. (2024) menemukan bahwa upah minimum memiliki dampak yang lebih besar terhadap migrasi ke luar negeri dibandingkan tingkat pengangguran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Pratomo (2025), PDB daerah memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap migrasi internasional, sedangkan pengangguran dan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Menurut penelitian Lova dan Aisyah (2024), tingkat pengangguran merupakan faktor utama. Terdapat korelasi negatif antara tingkat gaji dan migrasi internasional, menurut Listanto (2025). Penelitian ini diangkat dan dikembangkan dari penelitian Darta Pratama Atiyatna, Hamira, dan Yunisvita (2024) yang berjudul *“Determinants of Labor Migration to International Labor Markets: A Study of Sumatera Island”*, dengan menggunakan variabel-variabel berikut: upah minimum daerah, produk domestik bruto daerah, dan tingkat pengangguran terbuka; serta melaksanakan penelitian di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2020 hingga 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut, rumusan masalah pada studi ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap migrasi internasional pada kabupaten/kota di Sumatera Barat?

2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap migrasi internasional pada kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap migrasi internasional pada kabupaten/kota di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna:

1. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap migrasi internasional pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap migrasi internasional pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap migrasi internasional pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan studi ini memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan studi ini bisa berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan, dengan memperkaya kajian empiris mengenai determinan ekonomi migrasi internasional. Penelitian ini menyajikan bukti empiris terkait peran “Upah Minimum Regional (UMR), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” dalam menjelaskan dinamika migrasi internasional di tingkat regional. Selain itu, diharapkan hasil studi ini bisa menjadi rujukan bagi studi selanjutnya dalam merumuskan model

analisis migrasi yang mempertimbangkan kondisi pembangunan ekonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan studi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah serta para pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi di Sumatera Barat. Informasi mengenai pengaruh UMR, PDRB, dan TPT terhadap migrasi internasional dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pengupahan yang lebih responsif, peningkatan penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Migrasi internasional bukan sekadar respons terhadap kurangnya peluang di tingkat lokal; sebaliknya, hal ini seharusnya menjadi komponen yang terencana dan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan, dan hasil penelitian ini dapat membantu mewujudkan hal tersebut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian fokus terhadap migrasi internasional di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, dengan variabel independen berupa “Upah Minimum Regional” (UMR), “Produk Domestik Regional Bruto” (PDRB), dan “Tingkat Pengangguran Terbuka” (TPT). Periode penelitian mencakup tahun 2020–2024. Data yang dipakai ialah data panel berbentuk data sekunder yang didapat dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan studi ini terdiri atas tiga bab utama, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Bab I Pendahuluan

Dasar pemikiran penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan, kontribusi potensial, ruang lingkup penelitian, serta kerangka organisasi makalah ini semuanya diuraikan dalam bagian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, akan dijelaskan gambaran teoretis mengenai topik penelitian, ringkasan studi-studi terkait, analisis keterkaitan antar variabel (baik variabel independen maupun dependen), kerangka kerja penelitian, serta hipotesis yang akan diuji.

Bab III Metode Penelitian

Pada bagian ini, dijelaskan secara rinci strategi dan metodologi penelitian, model penelitian, langkah-langkah pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta alat analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Uraian data, analisis data, temuan penelitian, dan pembahasan merupakan bagian dari bab Hasil dan Pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan umum dari penelitian serta saran untuk penelitian atau praktik di masa mendatang yang dapat dikembangkan berdasarkan temuan-temuan ini.

